PROSIDING
SEMINAR NASIONAL

DINAMIKA GENDER

Menuju Akselerasi Pencapaian MDGs Di Indonesia

Editor :

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.
Dr. Elih Sudiapermana, M.Pd.
Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.

Kerjasama Universitas Sebelas Maret Surakarta
dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Kelompok II
Lingkungan dan Kesehatan

1. **Penanggulangan HIV/AIDs Sensitif Gender** 90
   Argyo Demartoto

2. **Perspektif Gender Dalam Program *Reducting Emmision Deforestation And Forest Degradation* Sebagai Upaya Pencapaian Sasaran MDGs 2015** 97
   Dewi Gunawati

3. **Hasrat Seksual Suami Buruh Migran Dan Pengetahuannya Tentang HIV/AIDs Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah** 107
   Hendri Restuadhi

4. **Tipologi Rumah Pengrajin Gerabah Setelah Gempa Sebagai Adaptasi Terhadap Industri Pariwisata Yang Berperspektif Gender** 122
   Mila Karmilah

5. **Perempuan Tangguh Bencana Di Yogyakarta (Studi Tentang Daya Lenting Perempuan Pasca Erupsi Merapi 2010)** 128
   Napsiah

6. **Reinvensi Nilai-Nilai Ekofeminisme Dalam Rumah Adat Jawa Sebagai Fondasi Pengelolaan Hunian Ramah Lingkungan** 136
   Nur Said

7. **Partisipasi Wanita Nelayan Dalam Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul** 145
   Oktiva Anggraini, Rahmat Slamet Suyoto

8. **Konversi Lahan Pertanian Produktif dan Dampaknya Bagi Perempuan Petani Di Kabupaten Sleman** 152
   Rahesli Humsona

9. **Tubuh Perempuan dan Difabilitas: Quo Vadis Sterilisasi Pada Perempuan *Down Sindrom*** 159
   Rina Herlina Haryanti

10. **Kesehatan Reproduksi Remaja Putri** 168
    Sumardiyono

11. **Penelitian Lingkungan Berprespektif Gender Di Bidang Kehutanan** 173
    Trisni Utami

12. **Strategi Mempertahankan Kearifan Lokal Kesehatan Pada Perempuan Samin Di Kaki Pegunungan Kendeng Pati** 179
    Waskito Widi Wardojo, Dwi Purnanto, Siti Muslifah

PARTISIPASI WANITA NELAYAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN BANTUL

THE FISHERWOMEN'S PARTICIPATION IN EVIRONMENTAL COASTAL MANAGEMENT IN BANTUL REGENCY

Oktiva Anggraini[1]; Rahmat Slamet Suyoto[2]

[1)] Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Ndalem Mangkubumen KT III/237 kode Pos 55132, Yogyakarta, Indonesia,
[2)] Dosen Politeknik API Jl Wisata Babarsari TB XV/15 Yogyakarta, Indonesia.

E-mail: oktivabiyan@yahoo.co.id

Abstrak

Upaya konservasi lingkungan dan manajemen pengelolaan hasil perikanan cenderung menfokuskan pada penangkapan ikan dibanding dengan mata rantai nilai-nilai lokal yang berkaitan dengan ekonomi dan pasar tenaga kerja. Partisipasi wanita nelayan lebih sering kurang dihargai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi wanita nelayan dalam pengelolaan perikanan dan kelautan di Kabupaten Bantul, dengan pendekatan kualitatif, metode interview, observasi, FGD dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan sejumlah contoh program konservasi lingkungan mengesampingkan peran wanita nelayan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Wanita nelayan lebih banyak mencurahkan waktu pada tanggung jawab domestiknya, pilihan diversifikasi mata pencaharian lebih sering terbatas. Keterbatasan ini diperburuk dengan rendahnya pendidikan. Menjadi penting, ketika tujuan pembangunan sejalan dengan pengelolaan lingkungan maka terdapat sejumlah manfaat menarik bagi perempuan dari pengelolaan lingkungan. Pemerintah diharapkan menghadirkan peran yang lebih besar dalam mendukung pemberdayaan perempuan.

Abstract

Resulting fisheries management and conservation efforts have tended to focus on managing exploitation of fish stocks, rather than the local value chain and fishery related economy and labor market. Fisherwomen's participation in coastal and fisheries management is unrecognized. The research will explore the fisherwomen's participation in coastal and fisheries management in Bantul Regency by using qualitative research with interviewed method, observation, FGD and documentation.
The result showed that there are many examples conservation program that have excluded women from design, implementation and evaluation programs. Fisherwomen must remain relatively close to home on order to tend to domestic responsibilities, livehood diversification options are often limited. These limitations are exacerbated by lack of education and in many instances basic illiteracy. Importantly, when conservation and development goals are linked, there are many benefits of enganging women in conservation. The government is expected to play a more extensive role in supporting fisherwomen empowerment.

Keywords: fisherwomen, participation, conservation

1. Pendahuluan

Seiring dengan berjalannya waktu, pariwisata sebagai generator ekonomi yang diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan baik secara struktural, spasial dan sektoral, menghadapi tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Eksploitasi destinasi wisata tanpa mengindahkan potensi lingkungan dan tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menimbulkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Luas terumbu karang yang ada di Indonesia sekitar 50.000 km2 diperkirakan hanya 7% terumbu karang yang kondisinya sangat baik, 33% baik, 46 % rusak dan 15 % lainnya kondisinya sudah kritis (Supriharyono, 2000). Lingkungan di beberapa obyek wisata rusak akibat volume pengunjung dan besarnya tekanan terhadap lingkungan. Terjaganya mutu lingkungan menjadi kebutuhan sebab dalam industri wisata, lingkungan itulah yang sebenarya dijual. Pembangunan pariwisata dan pengelolaan lingkungan hidup laksana dua sisi mata uang, saling melengkapi dan dapat menjadi daya tarik dan pesona bagi wisatawan.

Meningkatnya kesadaran berbagai pihak terhadap lingkungan dan isu-isu tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan telah memberikan konstribusi terhadap pandangan pentingnya prinsip-prinsip wisata berkelanjutan (Fandeli, 2005). Salah satunya, dengan diterbitkannya publikasi *"Our Common Future"* pada tahun 1987 oleh *"World Commission on Environment and Development"*, yang mengulas antara lain peran wanita yang semakin penting untuk turut serta atau mengambil bagian dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sehingga pemanfaatannya optimal dan berkelanjutan *(sustainable)* (Fitriana, 2012; Fragoudes, 2008). Dengan mengacu pada hal itu maka pola pengelolaan pariwisata didasarkan pada suatu rencana pengelolaan yang matang dan bertitik tolak dari aset-aset yang dimiliki, seperti keindahan alam, peninggalan sejarah dan budaya, lingkungan dan tata kehidupan masyarakat setempat (Gracia, 2010; Gaynor, 2010). Terdapat lima unsur penting yang mewarnai partisipasi masyarakat yaitu: 1) Komunitas yang menumbuhkan pengertian yang efektif; 2) Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran; 3) Kesadaran yang didasarkan atas perhitungan dan pertimbangan; 4) Antusiasme atau spontanitas, yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain, dan 5) Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama (Atmanto, 1995). Sedangkan wujud partisipasi pada prakteknya beraneka macam wujudnya: 1). partisipasi ide/gagasan; 2) partisipasi keterampilan; 3) partisipasi tenaga; 4) partisipasi harta benda; 5) partisipasi uang (Hamidjoyo, 1991). Wujud partisipasi juga dapat diklasifikasikan menjadi tujuh yaitu: (1). partisipasi simbolis; (2). partisipasi pasif; (3). partisipasi konsultatif; (4). partisipasi dengan insentif material; (5). partisipasi fungsional; (6). partisipasi interaktif dan (7). pengorganisasian diri (Vaneklasen dan Miller, 2009).

Partisipasi wanita nelayan berkaitan dengan pengambilan keputusan menurut Kumar (2004) pada umumnya tidak terorganisir dengan baik dan kurang efektif sebagai kekuatan politik dibanding lelaki. Ketika perempuan diberi tempat dalam suatu organisasi atau proses pengambilan keputusan maka hakekatnya mereka akan membawa suatu prespektif yang meletakkan peningkatan kualitas hidup dan mata pencaharian berbasis perikanan. Selama ini wanita nelayan lebih sebagai perempuan yang bergerak di bidang perikanan sebagai bakul ikan, pengelola hasil perikanan atau pengumpul biota laut yang suami atau ayahnya berprofesi sebagai nelayan. Nilai sosial rendah dilekatkan kepada pekerjaan domestik dan komunitas yang dilakukan perempuan.

Sekian banyak peran wanita nelayan tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembangunan berkelanjutan, yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Keseharian wanita nelayan berkaitan dengan problema ekologis bahkan acapkali menjadi korban dari eksploitasi ekologi. Di lain sisi, aspirasi wanita nelayan kadang kurang diperhatikan mengingat terbatasnya ketrampilan, waktu dan keterbatasan lainnya. Aspirasi ini sebenarnya dapat ditingkatkan mulai dari perencanaan hingga evaluasi secara kontinyu dan dinamis dengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi-budaya dan aspirasi masyarakat pengguna wilayah pesisir (*stakeholders*) serta konflik kepentingan dan pemanfaatan yang mungkin ada (Bengen, 2000). Penelitian Lawrence (2010) menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi akan meminimalkan konflik di suatu kawasan. Gardner (2010) memaparkan bahwa pengawasan program akan lebih efektif jika memberdayakan masyarakat sekitar.

Sebagai daya tarik pariwisata, perlu juga diperhatikan upaya perlindungan kawasan wisata agar tetap menjadi daya tarik dan menumbuhkan citra pariwisata (*tourism image*) atau identitas suatu daerah. Dengan berlabel kekhasan tersebut, Pantai Baru Bantul, yang menjadi lokasi riset, terletak 32 km dari Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata baru yang mendapat perhatian untuk dikembangkan menjadi wisata kuliner. Sejak dibukanya pantai Baru Bantul yang berdekatan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pandan Simo tahun 2010, kawasan ini berbenah diri yang pada gilirannya diharapkan dapat menyusul ketenaran

lokasi kuliner lain seperti pantai Depok dan pantai Parangtritis.

Ketertinggalan pantai Baru Bantul ini disebabkan sejumlah faktor seperti promosi media yang kurang, pola kerjasama *stakeholder* pariwisata belum mendukung dan sarana prasarana terbatas, serta pelayanan dan sanitasi kuliner kurang memuaskan pembeli. Ketersediaan kedai ikan dan pusat penjualan makanan tersebut tidak lepas dari berbagai masalah seperti kurangnya kebersihan, menu yang ditawarkan dan pemasarannya.

Hasil *pre-survey* menunjukkan, sejak dikembangkan tahun 2010 pantai Baru yang ingin menonjolkan keindahan hamparan cemara di sepanjang pantai menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang menuntut partisipasi yang tinggi dari masyarakatnya. Selain pantai Baru, Poncosari, pantai Parangtritis juga menjadi fokus riset. Wilayah ini juga tidak luput dari persoalan lingkungan. Sebagian lahan pesisir Desa Parangtritis berupa gumuk pasir *(sand dune)* seluas 9 kilo meter persegi menjadi area yang dilindungi, sehingga tidak diijinkan untuk dikembangkan menjadi daerah pertanian. Lahan pesisir ini dibiarkan ditumbuhi rumput dan tanaman pasir secara alami. Desa Parangtritis memiliki potensi wisata religi dan wisata bahari yang menarik untuk dikembangkan. Dengan demikian menjadi tantangan bagi Kelompok Sadar Wisata dan kelompok nelayan serta wanita nelayannya, sebagaimana yang diharapkan pemda setempat, agar dalam pengelolaan potensi laut, tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka riset ini akan mengkaji tentang partisipasi wanita nelayan dalam pengelolaan lingkungan di kawasan pesisir kabupaten Bantul, dan kendala apa saja yang ditemuinya dalam menyalurkan partisipasinya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kontribusi partisipasi wanita nelayan dalam pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir kabupaten Bantul beserta kendala partisipasi. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yakni di desa pesisir Poncosari pantai Baru, dan desa pesisir Parangtritis Kabupaten Bantul.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan. Penentuan *key informan* dilakukan dengan *purposive sampling*, terdiri dari pemrakrasa pengelolaan lingkungan yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, organisasi terkait dan kelompok sasaran yakni pemuka atau tokoh masyarakat dan kelompok wanita nelayan. Sumber data sekunder, berujud buku, jurnal, surat kabar, gambar dan sebagainya yang mendukung.

Dengan teknik pengumpulan data: *indepth interview*, observasi, dokumentasi dan FGD, penelitian ini menggunakan tahapan penelitian: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan data dalam penelitian ini digunakan metode triangulasi data, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2005: 330). Pengujian dilakukan dengan melakukan *cross check* terhadap beberapa informasi tertentu dengan pihak lain yang memahami atau menguasai permasalahan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Meningkatnya kesadaran wanita nelayan akan pentingnya kelestarian lingkungan.

Sejumlah perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran tentang kelestarian lingkungan menjadi ukuran dari meningkatnya kesadaran wanita nelayan akan pentingnya kelestarian lingkungan. Kesadaran mereka didasarkan atas perhitungan dan pertimbangan; didorong antusiasme atau spontanitas, dan adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, di dua lokasi penelitian menunjukkan fakta-fakta menarik. Pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, masing-masing telah mencanangkan berbagai program yang berkaitan dengan lingkungan, antara lain program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) dan program Budaya Hidup Bersih pemkab Bantul. Muaranya tak lain untuk menumbuhkan kesadaran dan perubahan sikap wanita nelayan untuk lebih giat berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan pesisir.

Fakultas Teknik UGM bersama Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan konsep *Zero Waste* dan pameran *master plan* di Pantai Baru Pandansimo. Pencanangan konsep *Zero Waste* tersebut dilakukan langsung oleh Dekan Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng serta Bupati Bantul, Hj. Sri Surya Widati, pada bulan Juli 2013 di Pendopo Desa Poncosari, Srandakan, Bantul.

Konsep *Zero Waste* menawarkan tujuan yang etis, ekonomis, efisien dan visioner, untuk mendorong masyarakat dalam mengubah gaya hidup. Konsep ini mengajak masyarakat untuk hidup meniru siklus alam yang berkelanjutan, dimana semua bahan terbuang, dapat digunakan sebagai sumberdaya bagi kegiatan lain. Menurut

Dr. Ir. Arif Kusuma-wanto MT, IAI., selaku ketua Tim Peneliti *Zero Waste* menjelaskan dipilihnya kawasan Pantai Baru Pandansimo disebabkan kekhasan *landscape* pohon cemara udang yang secara teknik digunakan sebagai *buffer* kawasan ketika terjadi ombak besar sehingga mampu melindungi desa di tepi pantai. Namun, seiring peningkatan kondisi ekonomi seperti wisata kuliner, permasalahan lingkungan muncul sebagai dampak meningkatnya aktivitas manusia. Pertumbuhan volume sampah dari pengunjung pantai dan limbah restoran juga semakin meningkat sehingga perlu digulirkan konsep *zero waste*.

Konsep *Zero Waste* mengacu pada prinsip 3R: *Reduce, Reuse, dan Recycle*, dan dilakukan di lokasi yang sedekat mungkin dengan sumber sampah. Bantul bisa menjadi kawasan bebas limbah layaknya kota-kota di luar negeri seperti Singapura dan Tokyo. Akan tetapi tidak mudah mewujudkannya. Untuk itu perlu mengubah budaya masyarakat tentang sampah dan perlu latihan keras untuk itu.

Wawancara dengan bapak Jumali Ketua Pokgiat Poncosari, Jumali menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak mudah:

> "Sudah dipasang spanduk besar agar tidak membakar sampah, masih saja ada yang membakar sampah, terutama sampah cemara" (Wawancara, Agustus 2013).

Observasi juga mendeskripsikan himbauan Pemda Bantul agar tidak membakar sampah melalui spanduk besar di depan gerbang pintu masuk Pantai Baru nampaknya belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat pesisir. Meskipun demikian, dibandingkan dengan nelayan, kesadaran wanita nelayan untuk menjaga kelestarian lingkungan jauh lebih baik.

Hal yang sama ditemui di desa pantai Parangtritis, tepatnya di pantai Depok. Meningkatnya kesadaran di wilayah ini tergambar dari pembahasan kebersihan lingkungan yang acap kali terangkat dalam pertemuan wanita nelayan baik di dasa wisma, pokdarwis maupun kegiatan lain di wilayahnya. Kesadaran ini dibangun oleh kepedulian dan manfaat yang mereka rasakan dari wisata bahari yang dikembangkan di pantai Depok. Mereka sadar bila lingkungan bersih maka wisatawan baik mancanegara, maupun domestik akan selalu tertarik untuk datang kembali ke pantai Depok.

3.2. Keterlibatan wanita nelayan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan.

Keterlibatan wanita nelayan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan dapat dilihat dari peran serta, dan curahan ide wanita nelayan pada perencanaan program pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian di dua lokasi menunjukkan bahwa pada umumnya wanita nelayan kurang banyak dilibatkan dalam perencanaan program pengelolaan lingkungan. Hal ini disebabkan keterbatasan pendanaan dan keterbatasan akses wanita nelayan yang mengakibatkan wanita nelayan lebih banyak menyampaikan aspirasinya melalui perwakilan kelompok. Dalam berbagai program-program pemerintah, perguruan tinggi, CSR swasta, suara wanita nelayan jarang didengar langsung oleh pembuat kebijakan:

> "kalau rapat-rapat, anggota tidak dilibatkan, hanya ketua yang diundang". (wawancara dengan ibu R, Agustus, 2013).

> "wanita nelayan biasanya hanya diwakili oleh pengurusnya, gantian yang datang, kadang ketua, kadang sekretaris" (wawancara dengan ibu N, September, 2013).

> "...*ndak* tertarik mbak, kan sudah ada pengurus, *mending* jualan". (wawancara dengan ibu T, Agustus 2013).

Berdasarkan penelusuran di lapangan, minimnya kontribusi partisipasi wanita nelayan ditinjau dari sisi perencanaan disebabkan sistem yang masih meminggirkan suara perempuan, keterbatasan wanita nelayan karena minimnya ketrampilan dan pengetahuan serta kesempatan yang sama dalam mendiskusikan persoalan-persoalan lingkungan:

> "Karena terbatasnya anggaran, kalau sosialisasi, kami memang hanya mengundang pengurus, paling tidak ketua pokdarwis atau ketua Poklaksar wanita nelayan". (wawancara dengan Humas Dinpar Bantul, September 2013).

Dari hasil FGD, terungkap fakta bahwa sekalipun dari sisi perencanaan kontribusi wanita nelayan terbatas, para pengurusnya berusaha didengar aspirasinya melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka. Dialog yang dibangun, meski sederhana, muaranya agar peran wanita nelayan dalam pelestarian lingkungan lebih banyak diperhatikan oleh berbagai pihak. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa warga akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

3.3. Keterlibatan wanita nelayan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

Keterlibatan wanita nelayan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan dapat dilihat dari

kontribusi tenaga, pikiran, waktu, dan bahkan material yang disumbangkan wanita nelayan terhadap pengelolaan lingkungan pesisir.

Sekalipun dari sisi perencanaan pengelolaan lingkungan pesisir, wanita nelayan kurang dilibatkan bukan berarti bahwa mereka sulit digerakkan untuk mensukseskan berbagai program pengelolaan lingkungan. Dibanding dengan kelompok wanita nelayan pantai Baru Poncosari, kelompok wanita nelayan pantai Depok lebih giat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Kontribusi tersebut berujud materi, sumbangan tempat, waktu, tenaga, dan sumbangan berupa uang iuran:

> "kalau rapat-rapat, lebih sering di rumah saya", (wawancara Ibu N, Ketua wanita nelayan Depok, Agustus 2013).

> "...*wonten tarikan*, disetor *teng* koperasi, *teng* kelompok *nggih wonten..kangge kebersihan niku lho*",(wawancara dengan pedagang ikan, S, Agustus 2013).

> "tiap kegiatan berlangsung, mengkoordinir ibu-ibu di sini tidak susah, asal waktunya jangan pas mereka jualan atau hari libur", (wawancara dengan penyuluh DKP, bapak R, September 2013).

Berbeda dengan kondisi pantai Depok, Parangtritis, Pantai Baru Pandansimo sejak dibuka tahun 2010 sampai saat ini sudah ada 82 warung. Awalnya, menurut Ketua Kelompok Kegiatan Pantai Baru, H. Jumali, tidak mudah untuk mengembangkan Pantai Baru dengan melihat para pelaku usaha yang sebelumnya bekerja sebagai petani atau peternak sehingga belum memiliki dasar kewirausahaan. Konsep penataan Pantai Baru, mensinergikan beberapa potensi yang ada, seperti pembangkit listrik tenaga hibrid sebagai wisata pendidikan, biogas, kuliner, dan pantai. Untuk itu kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, seperti UGM, sangat dibutuhkan untuk memajukan Pantai Baru dengan cara mengembangkan agrowisata di sisi utara pantai (wawancara dengan bapak Jumali, September 2013).

Data-data sekunder juga menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan telah dirintis sejak tahun 2011 di pantai Baru. Keterbatasan akses wanita nelayan terhadap teknologi, ketrampilan dan pendidikan yang terungkap dalam penelitian Anggraini (2009, 2011) tentang pemberdayaan wanita nelayan di kabupaten Bantul, merekomendasikan perlunya peningkatan pendampingan bagi kelompok wanita nelayan berbasis kearifan lokal. Kelompok pelaku usaha perempuan menjadi sasaran kegiatan berbagai pihak agar menjadi lebih mandiri. Berbagai pelatihan seperti manajemen keuangan, kelembagaan hingga pengemasan olahan kuliner telah disiapkan.Prinsipnya adalah penguatan baik di bidang informasi, data maupun SDM. Selain penguatan kelompok usaha perempuan di Pantai Baru, UGM terjun melalui mahasiswa KKN serta pengelolaan kawasan tanggap bencana. UGM dengan KKN maupun program tanggap bencana dari DERU *(Disaster Response Unit)* siap mendukung program-program penguatan tersebut.

Kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir di dua lokasi penelitian banyak yang dikaikan dengan kegiatan ekonomi budaya yang melibatkan partisipasi wanita nelayan. Kegiatan-kegiatan upacara adat yang unik dilakukan di wilayah penelitian meliputi Upacara adat Desa, Bekti Pertiwi, dan Upacara Labuhan Kraton Yogyakarta. Upacara Adat desa pada umumnya bersih desa/sedekah bumi, nyadran. Upacara ini diselenggarakan setahun sekali pada bulan-bulan Jawa (Sapar, Sura) atau sebelum panen (Ruwah), misalnya upacara bersih desa diselenggarakan pada bulan Sapar sesudah selesai panen. Sedangkan upacara adat Labuhan Kraton Yogyakarta merupakan upacara adat yang dilakukan oleh Kraton Yogyakarta.

Penyelenggaraan labuhan yang dilaksanakan pada waktu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dapat dikatakan berbeda dengan penyelenggarakan labuhan sebelumnya. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I, upacara labuhan diadakan apabila terjadi penobatan seorang raja, dimana pelaksanaannya satu hari sesudah penobatan berlangsung (jumenengan). Di samping ketiga labuhan tersebut, ada lagi peristiwa labuhan yang diadakan untuk kepentingan khusus, dimana waktu pelaksanaannya tidak tentu dan disesuaikan dengan kebutuhan yang dilaksanakan hanya di Parangkusumo. Salah satu labuhan untuk kepentingan khusus adalah labuhan yang diadakan pada saat Sri Sultan berkenan akan menikahkan putera/puterinya. Pelaksanaan labuhan khusus berbeda dengan labuhan rutin. Labuhan khusus diselenggarakan sangat sederhana dan tidak banyak diikuti dan disaksikan oleh masyarakat umum.

Adapun kegiatan kesenian yang melibatkan wanita nelayan diselenggarakan di wilayah penelitian berupa seni tari (reog, jathilan, tari-tari, dan wayang orang), seni theater (ketoprak, dan *srandul*), seni musik (*karawitan, slawatan, gejok lesung, mocopat, terbanan, thek-thek*).

Berdasarkan data empiris, bentuk keterlibatan wanita nelayan dalam pengelolaan lingkungan di kedua daerah penelitian dihimpun melalui lembaga-lembaga lokal, kelompok wanita nelayan, pokdarwis, arisan dan lembaga keagamaan.

3.4. Keterlibatan wanita nelayan dalam evaluasi pengelolaan lingkungan.

Idealnya, masyarakat berpartisipasi dengan merencanakan secara mandiri terhadap program-

program yang ditawarkan. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga eksternal untuk sumber daya dan saran-saran teknis yang dibutuhkan, namun kontrol terhadap sumber daya tersebut digunakan berada di tangan masyarakat sepenuhnya. Tipe partisipasi masyarakat ini sangat ideal, karena menunjukkan kemampuan masyarakat sudah sangat berdaya, hingga dapat mengadvokasi dirinya sendiri terhadap masalah yang menimpanya.

Hasil penelusuran di dua lokasi menunjukkan bahwa kontribusi wanita nelayan pada proses perencanaan program pengelolaan lingkungan hidup cukup berpengaruh pada kontribusi mereka pada proses evaluasinya. Partisipasi wanita nelayan yang semula bersifat simbolis, tidak selamanya menjadikan mereka pasif bila mendapat pendampingan yang intensif dari penyuluh. Demikian pula dari kontribusi mereka pada evaluasi program, peran dari penyuluh untuk menjadi fasilitator yang mengingatkan pentingnya kontrol dari warga, dapat menjembatani kekosongan atau minimnya peran wanita nelayan dalam pengelolaan lingkungan.

4. Kesimpulan

Penyadaran dan partisipasi *stakeholder* pariwisata termasuk wanita nelayan amat dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Partisipasi ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga manfaat yang diterima wanita nelayan. Partisipasi yang semula bersifat simbolis di lokasi penelitian dapat dikembangkan dengan pendampingan penyuluh yang intensif terhadap kegiatan-kegiatan kelompok wanita nelayan mewujud menjadi partisipasi mandiri. Pemerintah diharapkan menghadirkan peran yang lebih besar dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan partisipasi wanita nelayan dalam pengelolaan pesisir berkelanjutan.

Berkaca dari peran wanita nelayan yang cukup besar dalam pengelolaan lingkungan, partisipasi dapat didorong dengan menambah event-event wisata dan diversifikasi produk wisata, festival budaya lokal (upacara adat), pertunjukan kesenian (seni tari, *theater* dan seni musik), dan aspek kelestarian lingkungan, pembenahan fasilitas serta akses obyek wisata di antaranya taman bermain, penataan lingkungan sekitar pantai, berpeluang meningkatkan pendapatan wanita nelayan dan wilayah.

Daftar Pustaka

Anggraini, Pengembangan Model Pemberdayaan Wanita Nelayan dalam Penataan Wisata Kuliner yang Menunjang Program Minapolitan di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul; *Laporan Penelitian Hibah Bersaing, 2009.*

----------, Pemberdayaan Kelompok Wanita Nelayan dalam Pengembangan *Ecotourism* (Ekowisata) di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul; *Laporan Penelitian Hibah Bersaing, 2011.*

Atmanto, Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Kota Studi Kasus di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat, Kotamadya Semarang, *Tesis*: Institut Pertanian Bogor, 1995.

Bengen, D.G, Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem dan Sumberdaya Pesisir, *Makalah*, IPB-Bogor, 2000.

Fandeli, Chafid dan Muhammad Nurdin, *Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional*, Penerbit Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dengan Pusat Studi Pariwisata Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan Kantor Kementarian Lingkungan Hidup RI, Jakarta, 2005.

Fitriana, R, and N Stacey , The Role of women in the fishery sector of Pantar Island, Indonesia. Asian Fisheries Science: The Journal of the Asian Fisheries Society 25S. Asian Fisheries Science Special Issue. Gender in Aquaculture and Fisheries: Moving the Agenda Forward: 159–175, 2012.

Frangoudes, K, B Marugan-Pintos, and J. J Pascual-Fernandez. From open access to co-governance and conservation: The case of women shellfish collectors in Galicia (Spain). Marine Policy 32 (2): 223–232, 2008.

Garcia, Serge and Andrew Rosenberg. Food security and marine capture fisheries: characteristics, trends, drivers and future perspectives. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 365 (1554), 2010.

Gardner, T., *Monitoring Forest Biodiversity. Improving Conservation through Ecologically Responsible Management*, London: Earthscan. pp. 291–311, 2010.

Gaynor J.L., Flexible fishing: Gender and the new spatial division of labor in eastern Indonesia's rural littoral. Radical History Review, no. 107: 73–100. Gardner, T. (2010), *Monitoring Forest Biodiversity.*

Improving Conservation through Ecologically Responsible Management, London: Earthscan. pp. 291–311, 2010.

Kumar, K.G (Ed)., Gender Agenda. Women in Fisheries: A Collection of Articles From Samudra Report. *International Collective in Support of Fishworkers (ICSF)*. Chennai, 2004.

Lawrence, A. *Introduction: Learning from experiences of participatory biodiversity assessment. Taking Stock of Nature. Participatory Biodiversity Assessment for Policy, Planning and Practice* (ed A. Lawrence), Cambridge: Cambridge University Press.pp. 1–29, 2010.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Vaneklasen dan Miller, *Partisipasi Masyarakat dalam Anggaran Kinerja*, Makalah BIGS (Bandung Institute of Governance Studies), 2009.